

PROBLEMATIKA ANTARA POLITIK PENDIDIKAN DENGAN PERUBAHAN SOSIAL DAN UPAYA SOLUSINYA

Abstrak

Mardeli

*Dosen Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan
UIN Raden Fatah
Palembang*

Pendidikan sebagai upaya sadar seharusnya mengetahui bahwa pendidikan karakter bukan hanya semata menginginkan karakter orang Indonesia kembali pada jalurnya, melainkan adanya pendangkalan makna yang terjadi dalam pelaksanaan proses. Sedangkan pengertian politik pendidikan adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara penyampaiannya yang terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana dan kemana perangkat tersebut akan diarahkan. Pendidikan yang diberikan juga harus sedemikian rupa sehingga tidak menekankan pada perubahan-perubahan sosial dan kecerdasan. Pendidikan yang negatif cenderung selalu menguntungkan kaum yang kuat. Padahal semestinya pendidikan itu bersifat membebaskan. Pendidikan juga harus menekankan kepada pendidikan karakter, terutama hal moral dan pembentukan nilai-nilai. Porsi terbesar dari kegagalan dunia pendidikan terhadap kaum muda dewasa ini diakibatkan pendidikan ilmu-ilmu sosial yang hanya menjejalkan informasi hafalan dan tidak menyentuh kepada pembentukan watak, moralitas, sikap, atau proses berpikir peserta didik.

Kata Kunci: *Politik Pendidikan, Perubahan Sosial*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan sebuah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik, “Sebuah upaya sadar”, merupakan upaya pertama yang harus dilakukan institusi pendidikan. Upaya penyadaran yang dilakukan oleh institusi pendidikan bukanlah menyadarkan bahwa diri peserta didik bodoh dan perlu dicerdaskan, melainkan upaya penyadaran tentang eksistensi dirinya di dalam

dirinya dan di dalam masyarakat dimana ia melakukan kegiatan sosial. Upaya menyadarkan eksistensi diri sendiri oleh pendidikan haruslah bersifat dasar pada diri individu tersebut, sedangkan upaya penyadaran eksistensi dirinya di dalam masyarakat adalah upaya yang dilakukan institusi pendidikan agar peserta didik mampu merefleksikan apa yang terjadi pada dirinya dengan masyarakat, permasalahan dirinya dengan masyarakat, permasalahan masyarakat dengan dirinya dan lebih luas lagi eksistensi dirinya sebagai seorang warga sebuah negara. Dengan demikian hanya frase “upaya sadar” tidak bisa lepas dari sebuah kegiatan politis, yaitu kegiatan yang memiliki kepentingan menyadarkan diri tentang eksistensi dirinya dan masyarakatnya.

Namun demikian, pendidikan hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan. Disinilah politik berperan dalam pendidikan, sebagai variabel bebas yang bisa dimanipulasi, pendidikan bisa digunakan untuk kepentingan apapun dalam ukuran baik atau buruk. Pendidikan dimata politik hanyalah alat untuk melanggengkan sistem dan alat rekonstruksi sistem. Sebagai contoh ketika elit politik mengkehendaki karakter orang Indonesia harus kembali pada jalurnya sebagai karakter yang ramah, santun dan jujur. Maka pendidikan sebagai alat mencapai tujuan *menggarap* kurikulum pendidikan karakter. Pendidikan sebagai upaya sadar seharusnya mengetahui bahwa pendidikan karakter bukan hanya semata menginginkan karakter orang Indonesia kembali pada jalurnya, melainkan adanya pendangkalan makna yang terjadi dalam pelaksanaan proses. Orang berkarakter Indonesia disimbolkan dengan orang yang menggunakan pakaian rapi, licin, berkemeja dan bersepatu *kinclong*. Ini merupakan ekses yang terjadi ketika dalam pengerjaan kurikulum yang terintegrasi dengan pendidikan karakter *digarap* asal-asalan. Sehingga pelaku pendidikan seperti pendidik-peserta didik mengalami pendangkalan makna. Dari segi politik, bisa saja memang inilah yang dikehendaki oleh elit politik, menghegemoni budaya kaum elit. Kaum elit seringkali dianggap lebih tinggi derajatnya dan dianggap lebih santun *ketimbang* tukang becak dan kaum proletariat.

Maka sudah jelas kiranya pendidikan tidak boleh bebas nilai, karena akan sangat menguntungkan kaum yang sedang berkuasa pada saat itu, sebagai contoh kita seringkali mendapati perubahan kurikulum di setiap perubahan rezim yang berkuasa. Pendidikan haruslah bermuatan nilai yang dapat mengayomi masyarakat, pendidikan haruslah menjadi solusi bagi masyarakat sehingga terjadi perubahan struktur sosial menghapus kesenjangan yang dibuat ideologi liberal yang memisahkan antara pendidikan dan masyarakat, dan Indonesia bukanlah berideologi liberal namun berideologi Pancasila, yang

didalamnya telah mencanangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian pendidikan pasti menghasilkan perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi hanya pada individu terdidik, tetapi juga dapat terjadi pada aras sosial. Pendidikan memberikan sumbangan pada perubahan sosial yang terjadi pada individu maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka makalah ini akan membahas : (1). Pengertian Problematika antara Politik Pendidikan dengan Perubahan Sosial dan Upaya Solusinya. (2). Keterkaitan antara Politik dengan Pendidikan. (3). Hubungan antara Pendidikan dengan Perubahan Sosial. (4). Politik Pendidikan dan Perubahan Sosial dalam Konteks di Indonesia. (5). Membangun Kualitas Diri dengan Akhlakul Karimah dalam Kehidupan Berpolitik

Pengertian Problematika antara Politik Pendidikan dengan Perubahan Sosial dan Upaya Solusinya

Kingsley Davis menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.

Emile Durkheim menyatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi sebagai hasil faktor-faktor ekologis dan demografis, yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik, ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organik.

Selain itu William F. Ogburn menjelaskan bahwa arti perubahan sosial adalah perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan baik material maupun immaterial yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.

Sementara itu perubahan sosial menurut Selo Sumardjan adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang mencakup unsur kebudayaan secara material maupun immaterial, serta dapat mempengaruhi sistem sosial masyarakat tersebut.

Teori-Teori Perubahan Sosial

Secara garis besar, perubahan sosial dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam dan luar masyarakat itu sendiri. Di antara faktor yang berasal dari dalam masyarakat seperti perubahan pada

kondisi ekonomi, sosial, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun yang berasal dari luar masyarakat biasanya ialah yang terjadi diluar perencanaan manusia seperti bencana alam,. Kedua faktor-faktor ini memunculkan teori perubahan sosial, diantaranya (Soerjono Soekanto : 1985, 285) :

a. Teori Evolusi (Evolusionary Theory)

Teori evolusi banyak diilhami oleh pemikiran Darwin yang kemudian dijadikan patokan teori perubahan oleh Herbert Spencer, dan selanjutnya dikembangkan oleh Emile Durkheim dan Ferdinand Tonnies. Dalam konsep teoritis yang dikemukakan oleh para ahli dinyatakan bahwa evolusi memengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, utamanya adalah yang berhubungan dengan sistem kerja. Berhubungan dengan pemikiran ini Tonnies memandang bahwa masyarakat berubah berubah dari tingkat peradaban sederhana ke tingkat peradaban yang lebih kompleks

b. Teori Konflik (Conflict Theory)

Teori ini banyak diilhami oleh pandangan-pandangan Karl Mark, Frederict Engle, dan Ralf Dahrendorft. Teori ini memandang masyarakat dalam dualisme kelas yang tersusun atas kelas borjuis dan proletariat. Sumber perubahan adalah dualisme kelas sosial yang selalu bertentangan sebagai akibat ketidakadilan dalam pembagian aset-aset sosial ekonomi. Dalam pembagian ini kelompok proletar selalu berada dalam pihak yang menderita, sebab eksploitas kaum borjuis telah menyebabkan timbulnya penderitaan. Keadaan inilah yang akhirnya menjadi pemicu konflik sosial dalam wujud revolusi sosial yang berakibat pada perubahan sosial.

c. Teori perubahan sosial Dahrendorft

Danhendorft mengemukakan teorinya bahwa sebagaimana stabilitas struktur sosial, perubahan-perubahan dalam struktur kelas sosial akan berdampak pada dua peringkat, yaitu normatif ideologis (nilai) dan faktual institusional. Kepentingan dapat menjadi nilai-nilai tetapi juga menjadi realitas. Persamaan (*equality*) merupakan hak bagi setiap warga negara. Jika suatu kelompok kepentingan mempunyai kepentingan yang menekankan persamaan ini, maka kepentingan ini dapat direalisasikan ke dalam dua peringkat tersebut. *Pertama*, Nilai persamaan tersebut diterima dan dihayati oleh sebagian besar penduduk, artinya penduduk semakin *gandrung* (tergila-gila) akan persamaan. *Kedua*, Persamaan diwujudkan dalam pengaturan kelembagaan, seperti jaminan kesehatan bagi semua warga negara

(berobat gratis), biaya pendidikan di sekolah dan universitas di hapuskan, dan hukum diterapkan sama bagi semua warga negara tanpa memandang status dan posisi warga negara yang bersangkutan.

d. Teori Fungsionalis (*Functionalist Theory*)

Teori ini memandang penyebab dari perubahan adalah adanya ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku pada masa ini yang mempengaruhi pribadi mereka. Dalam hal ini William Ogburn menjelaskan, bahwa meskipun terdapat hubungan yang berkesinambungan antara unsur sosial satu dan yang lain, namun dalam perubahan ternyata masih ada sebagian yang mengalami perubahan tetapi sebagian yang lain masih dalam keadaan tetap (statis). Dengan demikian, setiap perubahan tidak selalu membawa perubahan pada semua unsur sosial, sebab masih ada sebagian yang tidak ikut berubah. Unsur yang tidak mengikuti perubahan ini dikatakan mengalami ketertinggalan yang berakibat pada ketimpangan atau kesenjangan kebudayaan.

e. Teori siklus (*Cyclical Theory*)

Teori ini menggambarkan bahwa perubahan sosial bagaikan roda yang sedang berputar, yang artinya perputaran zaman merupakan suatu hal yang tidak dapat dielak oleh siapa pun dan tidak dapat dikendalikan oleh siapa pun. Bangkit dan mundurnya sebuah peradaban merupakan bagian dari sifat alam yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia.

Selain itu, perubahan sosial tidak selamanya membawa akibat yang baik. Penganut teori ini di antaranya Arnold Toynbee yang diperkuat oleh teori Ibnu Khaldun dalam karyanya yang berjudul *Muqadimah*.

Masalah Yang Muncul Atau Dampak Perubahan Sosial

Perubahan sosial mengakibatkan terjadinya masalah-masalah sosial seperti kejahatan, atau kenakalan remaja. Meskipun begitu, tidak setiap masalah yang terjadi pada masyarakat disebut masalah sosial. Menurut Merton (dalam Soekanto), suatu masalah disebut masalah sosial jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak adanya kesesuaian antara ukuran-ukuran dan nilai-nilai sosial dengan kenyataan-kenyataan serta tindakan-tindakan sosial.
2. Semula ada pendapat keliru yang menyatakan bahwa masalah sosial bersumber secara langsung pada kondisi-kondisi ataupun proses-proses sosial. Pendapat tersebut tidak memuaskan dan telah ditinggalkan. Hal pokok di sini bukanlah sumbernya, melainkan akibat dari gejala tersebut

(baik gejala sosial maupun gejala bukan sosial yang menyebabkan terjadinya masalah sosial.

3. Pihak-pihak yang menetapkan apakah suatu kepincangan merupakan masalah sosial atau tidak. Dalam hal ini, urutannya sangat relatif.
4. Adanya masalah-masalah sosial yang terbuka dan masalah-masalah sosial yang tertutup. Masalah sosial tersebut timbul akibat terjadinya kepincangan-kepincangan masyarakat karena tidak sesuai dengan tindakan-tindakan dengan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat. Akibat hal tersebut, masyarakat tidak menyukai tindakan-tindakan yang menyimpang dan berlawanan dengan nilai-nilai yang berlaku.

Dampak Perubahan Sosial dalam Masyarakat.

Akibat atau dampak perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat berbentuk antara lain sebagai berikut (<http://belajarpsikologi.com/makala-dampak-perubahan-sosial/>) :

1. Pergolakan dan Pemberontakan

Proklamasi dikumandangkan sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia dapat diterima di berbagai daerah walaupun tidak secara bersamaan. Rakyat menyambut dan mendukungnya. Oleh karena itu, segera dibentuk suatu tatanan dan kehidupan sosial baru. Rangkaian peristiwa itu disebut revolusi. Adanya pergolakan dan pemberontakan di berbagai daerah pascakemerdekaan, berujung untuk menjatuhkan kedudukan penguasa pada saat itu, sekaligus menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap ideologi pemerintah.

2. Aksi Protes dan Demonstrasi

Aksi protes disebut juga unjuk rasa yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Hal itu terjadi karena setiap orang memiliki pendapat dan pandangan yang mungkin berbeda. Protes dapat terjadi apabila suatu hal menimpa kepentingan individu atau kelompok secara langsung sebagai akibat dari rasa ketidakadilan akan hak yang harus diterima. Akibatnya, individu atau kelompok tersebut tidak puas dan melakukan tindakan penyelesaian. Protes merupakan aksi tanpa kekerasan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat terhadap suatu kekuasaan. Protes dapat pula terjadi secara tidak langsung sebagai rasa solidaritas antarsesama karena kesewenang-wenangan pihak tertentu yang mengakibatkan kesengsaraan bagi orang lain.

3. Kriminalitas

Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan memberi peluang bagi setiap orang untuk berubah, tetapi perubahan tersebut tidak membawa setiap orang ke arah yang dicita-citakan. Hal ini

berakibat terjadinya perbedaan sosial berdasarkan kekayaan, pengetahuan, perilaku, ataupun pergaulan. Perubahan sosial tersebut dapat membawa seseorang atau kelompok ke arah tindakan yang menyimpang karena dipengaruhi keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi atau terpuaskan dalam kehidupannya.

Perbuatan kriminal yang muncul di masyarakat secara khusus akan diuraikan sebagai akibat terjadinya perubahan sosial yang menimbulkan kesenjangan kehidupan atau jauhnya ketidaksamaan sosial. Akibatnya, tidak semua orang mendapat kebahagiaan yang sama. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan setiap orang memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap hak dan kewajibannya. Setiap orang harus mendapat hak disesuaikan dengan kewajiban yang dilakukan.

4. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Bangsa Indonesia yang sedang membangun perlu memiliki sistem administrasi yang bersih dan berwibawa, bebas dari segala korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah korupsi menyangkut berbagai aspek sosial dan budaya maka Bung Hatta (dalam Mubyarto) mengatakan bahwa korupsi adalah masalah budaya. Apabila hal ini sudah membudaya di kalangan bangsa Indonesia atau sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa akan sulit untuk diberantas. Akibatnya, hal tersebut akan menghambat proses pembangunan nasional. Untuk memberantas korupsi, tidak hanya satu atau beberapa lembaga pemerintahan saja yang harus berperan, tetapi seluruh rakyat Indonesia harus bertekad untuk menghilangkan korupsi.

5. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja merupakan disintegrasikan dari keutuhan suatu masyarakat. Hal itu karena tindakan yang mereka lakukan dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, kenakalan remaja disebut sebagai masalah sosial. Munculnya kenakalan remaja merupakan gejala kehidupan yang disebabkan adanya perubahan-perubahan sosial di masyarakat, seperti pergeseran fungsi keluarga karena kedua orangtua bekerja sehingga peranan pendidikan keluarga menjadi berkurang.

Selain itu, pergeseran nilai dan norma masyarakat mengakibatkan berkembangnya sifat individualisme. Juga pergeseran struktur masyarakat mengakibatkan masyarakat lebih menyerahkan setiap permasalahan kepada yang berwenang. Perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan unsur budaya lainnya dapat mengakibatkan disintegrasi.

Pengertian Politik Pendidikan

Politik pendidikan adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara penyampaian yang terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana dan kemana perangkat tersebut akan diarahkan (<http://id.wikipedia.org/wiki/politik-pendidikan>).

Selain itu politik pendidikan juga diartikan sebagai metode mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Politik pendidikan juga berorientasi pada bagaimana pendidikan dapat dicapai dengan baik. Berbeda dengan pendidikan politik (penpol), yakni usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik bagi perannya di dunia politik. Dan pendidikan politik ini juga menjadikan manusia melek akan politik (Amnur Ali Muhdi : 2007).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud problematika politik pendidikan dengan perubahan sosial dan upaya solusinya adalah permasalahan yang berkaitan dengan kekuatan dari penguasa pembuat kebijakan di bidang pendidikan dalam rangka untuk mengubah struktur dan fungsi masyarakat serta upaya memecahkan permasalahannya.

Jika politik dipahami sebagai “praktik kekuatan, kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat, serta pembuatan keputusan-keputusan otoritas tentang alokasi sumber daya dan nilai-nilai sosial” (Harman, 1974: 9), maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik. Semua lembaga pendidikan, baik pemerintah maupun non pemerintah, dalam batas-batas tertentu tidak terlepas dari bisnis pembuatan keputusan-keputusan yang disertai otoritas dan yang dapat diberlakukan. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut terlibat dalam praktik kekuatan, kekuasaan dan otoritas. Dengan kata lain, politik adalah bagian dari paket kehidupan lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan menurut Baldridge (1971), lembaga-lembaga pendidikan dipandang sebagai sistem-sistem politik-mikro, yang melaksanakan semua fungsi utama sistem-sistem politik.

Keterkaitan antara Politik dengan Pendidikan

Pendidikan selalu sepihak, pendidikan yang diberikan oleh pendidik selalu berdasarkan keinginan pola penguasa yang menetapkan kurikulum. Dan karenanya politik ternyata sangat berkait erat dengan pendidikan. Politik adalah kebijakan. Siapa yang menguasai politik atau siapa yang menjadi pemimpin dialah yang kemudian menentukan arah pendidikan. Hal seperti ini bisa membawa ke dua hal positif dan negatif.

Karena bahaya-bahaya tersebut Ivan Illich menggambarkan bahwa pendidikan formal justru harus ditolak. Peningkatan ilmu harus dikaitkan dengan keberhasilan. Imaginasi murid dilatih untuk menerima jasa bukan nilai. Ivan Illich. (1982:11). Pelembagaan ternyata akan mengakibatkan polusi fisik, polarisasi sosial dan impotensi psikologis. Degradasi nilai ini ternyata semakin dipercepat ketika orang menganggap kebutuhan non material itu sebagai suatu komoditi. Karena itu sistem pendidikan formal harus ditolak. Ivan Illich. (1982:40).

Politik modern telah selalu melupakan perannya sebagai pendidik, karena adanya gambaran “jasa” tersebut. Pendidikan hanya dipandang sebagai sebuah tujuan dan bukan proses belajar. Karenanya perubahan sosial yang seharusnya dibawa dalam pendidikan dilupakan. Semua tergantung apabila ternyata pemerintah yang menetapkan kebijakan pendidikan adalah sebuah pemerintahan yang baik, yang serius ingin memajukan pendidikan di negaranya, maka dunia pendidikan di Negara tersebut akan maju. Sebaliknya, apabila pemerintah yang menetapkan kebijakan politik pendidikan adalah pemerintahan yang kurang peduli terhadap pendidikan, bahkan cenderung ingin menguasai pendidikan tersebut, maka politik pendidikannya akan menjadi sangat subyektif. Sebagai sebuah contoh pelajaran sejarah adalah sebuah pelajaran yang sangat rentan terhadap manipulasi pendidikan. Sejarah bisa saja ditulis berdasarkan pemenang sejarah, dan bukan berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi.

Secara negatif, pendidikan bisa dipandang sebagai perpanjangan tangan penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya karena mereka memberikan pendidikan berdasarkan apa yang mereka suka dan inginkan agar kelanggengan kekuasaan mereka tetap terjaga. Politik pendidikan yang dibawa oleh pemerintahan yang cenderung memandang pendidikan sebagai sebuah perpanjangan tangan penguasa akan menjadi sebuah politik pendidikan yang sepihak, berdasarkan apa yang ingin diberikan oleh penguasa.

Sebaliknya, apabila kita memandang politik pendidikan secara positif, di mana pemerintah yang menetapkan kebijakan-kebijakan tersebut adalah benar-benar serius terhadap perubahan sosial, maka politik pendidikan yang dibawa akan memberikan sebuah perubahan sosial yang positif. Masyarakat akan bisa dididik melalui pendidikan yang ditetapkan oleh politik pendidikan sebuah pemerintahan tertentu.

Pendidikan yang diberikan juga harus sedemikian rupa sehingga tidak menekankan pada perubahan-perubahan sosial dan kecerdasan. Pendidikan yang negatif cenderung selalu menguntungkan kaum yang kuat. Padahal semestinya pendidikan itu bersifat membebaskan.

Hubungan antara Pendidikan dengan Perubahan Sosial

Ketika sebuah pemerintahan yang memegang politik pendidikan secara positif, di mana mereka melihat pendidikan sebagai sebuah usaha mencerdaskan dan bukan sebagai perpanjangan tangan penguasa, maka perubahan sosial yang dibawanya dapat menuju ke sebuah arah yang lebih baik.

Ketika Amerika Serikat masih membenahi sistem pendidikannya, problema-problema baru juga timbul. Ketika pemisahan ras masih sangat kuat, dan pemerintah Amerika berusaha membaurkan mereka yang berkulit hitam dan yang berkulit putih, maka yang terjadi adalah anak-anak kulit putih dengan golongan ekonomi menengah keatas memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dibandingkan mereka (kulit hitam) yang berasal dari golongan sosial kelas menengah. Problem sosial jarang walaupun pernah terjadi dapat dipecahkan semata-mata dengan pendidikan. (John Vaizey 1974)

Boeve mengatakan bahwa perkembangan dunia saat ini dikuasai oleh "master narasi ekonomi". Segala sesuatu dihitung berdasarkan keuntungan yang dihasilkannya. Hal yang sama juga terjadi pada dunia pendidikan. Pada tekhno sains, perkembangan ilmu tersebut memiliki tujuan perkembangan ekonomi. Modal-modal besar yang mendanai setiap penelitian yang dilakukan memiliki sebuah tujuan keuntungan ekonomi di belakangnya.

Di Indonesia, banyak orang berfikir bahwa pendidikan telah berubah menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pendidikan hanyalah digunakan sebagai batu loncatan untuk mencari pekerjaan. Pendidikan hanya menjadi sarana. Pendidikan adalah proses pembentukan secara keseluruhan dan bukan tujuan itu sendiri. Hal ini menjelaskan maraknya praktek jual beli gelar saat ini. Kegandrungan akan gelar terjadi karena orang melihat gelar pendidikan hanya sebagai sarana aktualisasi diri, juga sebagai penambah gengsi seseorang, yang pada akhirnya juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Pendidikan juga harus menekankan kepada pendidikan karakter, terutama hal moral dan pembentukan nilai-nilai. Porsi terbesar dari kegagalan dunia pendidikan terhadap kaum muda dewasa ini diakibatkan pendidikan ilmu-ilmu sosial yang hanya menjejalkan informasi hafalan dan tidak menyentuh kepada pembentukan watak, moralitas, sikap, atau proses berpikir peserta didik. (J. R. Sutarjo Adisusilo, 2000).

Pendidikan yang membawa nilai-nilai tersebut akan menyadarkan peserta didik bahwa pendidikan bukanlah jasa, melainkan sebuah proses yang terjadi terus menerus. Proses pendidikan yang membawa nilai akan memberikan sebuah perubahan

sosial yang membebaskan. Pelajaran ini harus datang dari sang tertindas sendiri dan orang-orang yang sungguh setia kawan terhadap mereka. (Paulo Freire, 1999).

Menuju pendidikan yang membebaskan ini, Freire mengatakan bahwa pertanyaan yang harus ditanyakan ialah mungkinkah kita melakukan perubahan tersebut. (M. Eskobar, 1998).

Pendidikan juga lebih sering dipakai sebagai sebuah proses penyadaran ketika seseorang atau sebuah komunitas sudah melakukan hal yang destruktif terhadap kehidupan, seperti melakukan kekerasan. Melalui pendidikan yang baik, hal ini dapat dengan perlahan ditransformasi menjadi sebuah hal yang mengajarkan sebuah perubahan sosial yang tanpa kekerasan. Namun, kembali lagi kepada politik pendidikan tersebut, siapakah yang sebenarnya menjalankan politik tersebut? Apakah ada kepentingan yang bermain di dalamnya?

Politik Pendidikan dan Perubahan Sosial dalam Konteks di Indonesia

Menurut Anthony Giddens pendidikan mempunyai hubungan yang sangat kompleks dengan pemerataan. Seharusnya pendidikan dapat membantu penegakan keadilan, namun sering pendidikan malah menghasilkan ketidakadilan dan mempertajamnya. Inilah yang terjadi dalam konteks Indonesia. Memang pendidikan dapat mengurangi ketidakadilan terutama pada kelompok masyarakat pinggiran, tetapi pada saat yang sama pendidikan malah melanjutkan ketidakadilan yang telah ada dalam masyarakat. Jurang perbedaan bukan mengecil namun malah melebar. Di kalangan bawah siapa tidak mencapat pendidikan yang memadai sukar pula mendapat pekerjaan yang lumayan, dan di kalangan yang lebih tinggi jurang makin melebar di antara mereka yang menikmati pendidikan tinggi dan yang tidak.

Giddens mengiyakan bahwa pendidikan tidak dapat mengembangkan keadilan. Namun ia menambahkan bahwa kita dapat memulangkan masalah ketidakadilan pada pendidikan saja, seakan hanya pendidikan yang dapat menciptakan keadilan. Untuk mengurangi ketidakadilan, senjata yang diperlukan bukan hanya pendidikan tetapi juga keputusan-keputusan politik. (Sindhunata, 2002).

Pendidikan harus membantu orang untuk menjadi manusia yang berwatak. Mohammad Hatta membedakan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan membentuk karakter, pengajaran memberikan pengetahuan yang dapat digunakan dengan baik oleh anak-anak yang mempunyai karakter. Maka bagi Hatta yang utama bukanlah sekolah menengah umum atau sekolah kejuruan, melainkan pendidikan watak

yang bisa membuat manusia hidup dalam pergaulan sesama yang adil dan sejahtera.(Sindhunata, 2002).

Ketidakadilan pendidikan di Indonesia semakin dipertajam dengan mahalanya biaya pendidikan.Bagi orang yang tidak mampu tahun ajaran baru adalah tahun yang penuh penderitaan karena begitu besar biaya yang harus dikeluarkan untuk anak-anak mereka.Pendidikan memang memakan biaya, tetapi haruskah biaya itu dibebankan pada warga Negara yang jelas-jelas tidak mampu menanggungnya.

Tujuan akhir pendidikan adalah pembebasan dan emansipasi masyarakat dari kebodohan, kemiskinan dan penderitaan mereka.Semua warga Negara berhak atas pembebasan dari emansipasi itu.Kesempatan untuk memperoleh pendidikan harus diberikan kepada semua orang.

Pendidikan harus mampu mengangkat anak kelas pekerja setara dengan anak kelas menengah, anak mereka yang menganggur setara dengan dengan anak mereka yang aktif bekerja.Pendidikan di Indonesia masih sangat jauh dari hal di atas.Pendidikan kita belum membebaskan dan mengangkat anak-anak didik untuk kelak benar-benar menjadi warga negara. Karena tidak tersedianya kesempatan yang sama, di Indonesia banyak anak putus sekolah, akibatnya banyak anak buruh yang tetap menjadi buruh, anak penganggur yang tetap menjadi penganggur kendati mereka sempat mendapat pendidikan. Dilihat secara menyeluruh pendidikan kita tidak berhasil mengantisipasi masyarakat.Pendidikan yang seharusnya membebaskan malah menindas sebagian warga yang tidak mampu.

Berangkat dari konteks masyarakat kita di Indonesia, adakah hubungan pendidikan dengan politik?Bagi sebagian besar masyarakat kita pendidikan dan politik adalah dua hal yang berbeda dan berpisah, dan antara keduanya tidak ada hubungan.Pandangan masyarakat ini tampak dengan jelas pada sikap para politisi kita terhadap masalah-masalah ekonomi, politik dan pendidikan.Saat ini yang menjadi pusat perhatian dari dalam pikiran para politisi kita ialah masalah ekonomi, dan politik.Masalah pendidikan sepertinya dipinggirkan dari dalam alam pikiran para politisi kita.Pendidikan adalah masalah yang relatif tidak penting.Pendidikan adalah suatu “non issue”, suatu hal yang mudah, yang dapat ditangani oleh siapa saja.(Sindhunata, 2002).

Ada suatu hal yang dilupakan oleh politisi kita, yaitu bahwa keadaan kehidupan pendidikan pada waktu sekarang akan mempengaruhi kondisi kehidupan ekonomi dan politik di masa depan. Jika kita sekarang membiarkan kondisi pendidikan kita saat ini maka dapat dipastikan bahwa kehidupan ekonomi dan politik kita dimasa depan akan menyedihkan. Para politisi kita tidak menyadari bahwa

pendidikan selalu bersifat antisipatoris dan preparatoris, yaitu selalu mengacu ke masa depan.

Mochtar Buchori mengungkapkan ada sebuah fenomena historis yang memperlihatkan bahwa antara pendidikan dan politik terdapat suatu hubungan. Di Indonesia pada periode 1908-1945 ditandai dengan kehadiran pemimpin-pemimpin politik yang penuh dedikasi dan gigih dalam perjuangan mereka mengusahakan Indonesia merdeka. Sebaliknya dalam periode antara 1959 dan 1998, kita saksikan bersama kehadiran pemimpin-pemimpin dan pelaku-pelaku politik yang tidak memiliki idealisme yang cukup nasionalistik dan patriotik, atau kalah memilikinya, mereka tidak mampu menyatakannya dalam bentuk perilaku politik yang pantas diteladani. Mochtar Buchori menggunakan tiga generalisasi untuk menjelaskan kontras yang tajam ini. *Pertama*, adanya perbedaan dalam mutu pendidikan dasar yang mereka terima sebelum mereka memasuki kehidupan politik. *Kedua*, karena pada era sebelum kemerdekaan, dunia politik dipenuhi oleh para kalangan terdidik, sedangkan dalam era pasca kemerdekaan, dunia politik dihuni oleh golongan yang relatif kurang terdidik tetapi mampu menggalang dukungan dari masyarakat. *Ketiga*, adanya perbedaan “semangat zaman”. Dalam periode 1908-1945 “semangat melawan dan membebaskan” tumbuh dengan baik, sedang dalam periode 1959-1998 semangat melawan dan membebaskan ini diperlemah secara sistematis, dan akhirnya menjadi lumpuh sama sekali. Semangat zaman yang ada selama Orde Baru ialah semangat “mengabdikan penguasa”.

Dari ketiga generalisasi yang diberikan dapat dilihat bahwa pendidikan bukan satu-satunya faktor yang menjadi sumber dari timbulnya perbedaan yang bersifat inter-generasional dalam budaya politik. Namun juga tidak menyangkal tesis mengenai pentingnya peranan pendidikan dalam pembinaan kemampuan politik dasar. Tidak ada sekolah yang dapat mempersiapkan calon pelaku politik secara tuntas, yaitu sampai calon pelaku politik menguasai kemampuan-kemampuan politik dasar. Dengan demikian proses pengembangan diri menjadi pemimpin politik atau pelaku politik yang baik menuntut kemampuan mendidik diri sendiri, kemampuan belajar yang tinggi. Menjadi pemimpin yang setara dengan para perintis kemerdekaan diperlukan kemampuan belajar yang tinggi. Makin tinggi kemampuan belajar ini, makin cepat kedewasaan politik tercapai.

Dari pendidikan umum yang diterima seseorang sebelum memasuki kehidupan politik. Makin kokoh pendidikan umum yang diterima makin besar seseorang menguasai kecakapan politik yang mendasar. Pengembangan budaya politik hanya dapat dilakukan oleh generasi yang memiliki kemampuan intelektual yang cukup

tinggi. Pendidikan umum ini mencakup kecakapan-kecakapan intelektual yang bersifat umum, meliputi pengetahuan bahasa, matematika, pengetahuan tentang lingkungan fisik, pengetahuan tentang lingkungan sosial dan kultural, dan pengetahuan tentang diri sendiri. Pengetahuan tentang diri sendiri ini adalah yang sangat penting. Bagaimana pun cerdasnya dan terpelajarnya seseorang, kalau dia tidak mengenali dirinya dengan baik, maka ia tidak akan dapat menempatkan dirinya secara tepat dalam lingkungannya.

Membangun Kualitas Diri dengan Akhlakul Karimah dalam Kehidupan Berpolitik

Akhlak merupakan suatu naluri asli dalam jiwa seseorang manusia, yang dapat melahirkan sesuatu tindakan dan kelakuan dengan gampang dan mudah tanpa rekaan fikiran. Maka jika naluri tersebut melahirkan suatu tindakan dan kelakuan yang baik lagi terpuji menurut akal dan syara, dinamakan budi pekerti yang baik, tetapi manakala naluri itu melahirkan sesuatu perbuatan dan kelakuan yang jahat, maka dinamakan budi pekerti buruk (*Al-Ghozali, tt., juz III : 52*). Selain itu, akhlak berarti kebiasaan berkehendak (*Ahmad Amin, 1975 : 62*).

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa yang disebut akhlak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, jika yang diulang-ulang itu perbuatan terpuji, maka akan mempunyai akhlak terpuji (*mahmudah*). Sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan itu adalah yang dilarang agama, maka melahirkan akhlak tercela (*mazmumah*). Oleh karena itu, yang penting diketahui dan dilakukan adalah bahwa manusia sebagai individu harus membiasakan berperilaku yang baik serta membiasakan untuk meninggalkan perilaku tercela yang dilarang oleh agama.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut *Christine Sanford & Wyn Beardsley* bahwa setiap individu mempunyai pengalaman yang berbeda dalam dirinya dan dari perbedaan ini pola individu dari respon dibina, yang membawanya memahami pola perilaku (*Christine Sanford & Wyn Beardsley, 1994 : 66*).

Cara yang dilakukan untuk membiasakan berperilaku yang baik menurut *Abdul Karim* yang mengutip pendapat *Imam al-Ghozali* adalah bahwa memperbaiki akhlak itu tak akan tercapai kecuali setelah membersihkan jiwa, sedangkan membersihkan jiwa adalah tunduk (patuh) terhadap cara-cara (ketentuan) syara' (*Abdul Karim, 1995 : 35*). Berkenaan dengan hal itu, Ahmad Amin berpendapat bahwa cara mendidik akhlak dan meninggikannya adalah melalui *:pertama :* meluaskan lingkungan fikiran, maksudnya sebagaimana menurut Herbert Spencer bahwa sungguh fikiran sempit merupakan sumber

beberapa keburukan, dan akal yang kacau balau tidak akan membuahkan akhlak yang tinggi, *kedua* : berkawan dengan orang-orang terpilih, *ketiga* : membaca dan menyelidiki perjalanan para pahlawan dan yang berfikiran luar biasa, *keempat* : yang lebih penting memberi dorongan kepada pendidikan akhlak ialah supaya orang mewajibkan dirinya melakukan perbuatan baik bagi umum yang selalu diperhatikan olehnya dan dijadikan tujuan yang harus dikejanya sehingga berhasil, *kelima* : apa yang kita tuturkan di dalam “kebiasaan” tentang menekan jiwa melakukan perbuatan yang tidak ada maksud kecuali *menundukkan jiwa* (Ahmad Amin, 63-66).

Selain hal-hal yang di atas bahwa untuk membiasakan meninggalkan perilaku tercela dan membiasakan melakukan perilaku yang terpuji itu memerlukan suatu riadhah atau latihan tertentu agar jiwa kita tidak menjadi liar. Hal ini sejalan dengan pendapat Al-Ghazalibahwa : “budi pekerti luhur hanya dapat dicapai dengan mengekang hawa nafsu dengan melakukan *mujahadah*, melatih diri, berusaha menjernihkan jiwa dan mempertinggi akhlak” (Al-Ghazali, 2011, tt., : 172-173). Yang menjadi perhatian intens bahwa, untuk berakhlak terpuji, harus dilakukan melalui pembiasaan atau *urf*, walaupun pada awalnya terkesan terdapat pemaksaan, tetapi pada akhirnya setelah dilakukan berulang-ulang, maka kesan “*pemaksaan*” itu hilang secara otomatis, apalagi setelah kegiatan pembiasaan itu, akan melahirkan “*rasa cinta dan kesadaran*” akan perlunya akhlakul karimah bagi setiap individu di dalam hidup dan kehidupannya dan pendidikan akhlak perlu diterapkan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Simpulan

Politik dan pendidikan pada dasarnya saling melengkapi. Pendidikan politik yang benar akan membawa sebuah politik pendidikan yang baik pula. Tidak dapat disangkal bahwa perubahan yang dibawa politik pendidikan tersebut dapat berjalan menuju dua arah, ke arah yang terikat tangan penguasa, atau ke arah yang lebih membebaskan.

Indonesia adalah sebuah contoh negara yang selama ini rakyatnya terbelenggu oleh pendidikan yang disajikan oleh penguasa, sehingga pemikiran menjadi sangat sempit. Pendidikan yang seharusnya membebaskan tersebut, telah dipakai sebagai alat melanggengkan kekuasaan, sehingga hanya membawa sebuah kesenjangan sosial yang semakin lebar antara mereka yang mampu dan mereka yang tidak mampu. Bagi yang mampu membiayai pendidikannya tentu akan memilih pendidikan yang baik, sehingga nantinya dia juga akan mendapatkan penghasilan yang tinggi karena

pendidikannya tersebut. Orangtua juga jangan melepaskan tanggungjawabnya sebagai pendidik yang utama. Sekolah hanyalah rekan orangtua dalam memberikan pendidikan, bukan sebagai satu-satunya pendidik sebagai solusi terhadap permasalahan politik pendidikan dan perubahan sosial adalah menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah kepada warga Negara melalui pendidikan

Pendidikan di Indonesia selama ini lebih sering dianggap sebagai sebuah batu loncatan bagi narasi ekonomi yang sudah ada di benak naradidik. Pendidikan yang setinggi-tingginya diperoleh hanya untuk mendapatkan gelar bagi pencapaian taraf ekonomi yang lebih baik. Praktek penjualan gelar mampu melihat pangsa pasar yang sangat menjanjikan di Indonesia akibat pola pikir yang demikian. Sedikit sekali nilai-nilai yang diajarkan di Indonesia, karena pola pendidikan di Indonesia berangkat dari ketakutan naradidik dan trauma terhadap pendidik. Hal ini membawa perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Itu semua harus dirubah apabila Indonesia ingin memperoleh perubahan sosial ke arah yang baik. Pendidikan jangan diberangkatkan dari ketakutan, dan jangan menjadikan pendidikan formal sebagai satu-satunya sarana pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 2010. Departemen Republik Indonesia, Bandung: Diponegoro
- Abdul Syani. 1992. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Al Ghazali, Abu Hamid. 1996. *Al-Munqidh min al-Dhalal* : Tahqiq Abd al-Halim Mahmud, Qahirah, Al-Anjlo al-Mishriyyah.
- Amin, Ahmad. 1969. *Zhuhr al-Islam*, Qahirah, Dar al-Kitab al-Araby.
- Buchori, Mochtar. 2001. *Pendidikan Antisipatoris*, Jakarta, Kanisius. (<http://id.wikipediaorg/wiki/politik-pendidikan>)
- Ivan Illich. 1982. *Bebas Dari Sekolah*, Jakarta: Sinar Harapan.
- J.I.G.M. Drost. 2000. *Sekolah Mengajar Atau Mendidik*, Yogyakarta, Kanisius.
- John Vaizey. 1974. *Pendidikan di Dunia Modern*, Jakarta: Gunung Mulia.
- J. R. Sutarjo Adisusilo. 2000. "Pendidikan Nilai dalam Ilmu-ilmu Sosial-Humaniora" dalam A. Atmadi & Y. Setyaningsih (eds.) *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium ketiga*, Yogyakarta, Kanisius
- J. Sudarminta. 2000. "Tantangan dan Permasalahan Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium Ketiga" dalam A. Atmadi & Y. Setyaningsih (eds.), *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga*, Yogyakarta, Kanisius & Univ. Sanata Dharma.
- L. Boeve. 2002. "J.F. Lyotard's Critique of Master Narratives Towards Postmodern Political Theology, dalam *Liberation Theology on Shifting Grounds* Lihat Sindhunata, "Pendidikan Meningkatkan Ketidakadilan" dalam *BASIS*.
- M. Eskobar, et.al (eds.). 1998. *Sekolah Kapitalisme Yang Licik*, Yogyakarta, LkiS.
- Paulo Freire. 1999. "Pendidikan Yang Membebaskan, Pendidikan Yang Memanusiakan" dalam Paulo Freire, et.al (eds.), *Menggugat Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiadi, Elly. 2010. Pengantar Sosiologi. Bandung : Prenada.
- Sindhunata, "Pendidikan Hanya Menghasilkan Air Mata" dalam *BASIS* No 07-08, Tahun ke-49, Juli Agustus 2000